

RENCANA KINERJA (RENJA)

KECAMATAN MARITENGGAE



PEMERINTAH KABUPATEN

SIDENRENG RAPPANG

TAHUN 2022

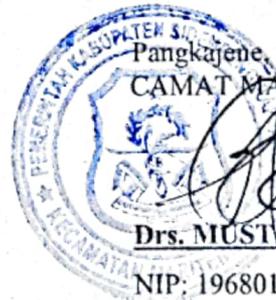
KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT serta limpahan rahmat dan hidayahNYA kepada kita semua, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap dapat terlaksana secara tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maritengngae memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan mencakup segala bidang, sehingga perbaikan disegala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal diinginkan baik oleh pemerintah terlebih oleh masyarakat. Begitupula dengan proyeksi kedepan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang tentunya berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 adalah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Program Strategis Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Anggaran.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan Renja Kecamatan Maritengngae masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan datang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap renja ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Pangkajene, 12 Juli 2021

CAMAT MARITENGGAE

Drs. MUSTARI KADIR, M. Si

NIP: 19680119 199112 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	2
I.3. Maksud dan Tujuan	7
I.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	27
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah	28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	37
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	37
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	40
4.2. Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	47
BAB V. PENUTUP	51
LAMPIRAN	52

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang	39
Tabel 2. Indikator Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang	47
Tabel 3. Formulasi Pengukuran Indikator Sasaran/Kinerja Program (Outcome) Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang	50

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra kecamatan Maritengngae tahun 2019 s/d 2023	11
Lampiran 2. Pencapaian kinerja pelayanan kecamatan Maritengngae	26
Lampiran 3. Review terhadap rancangan awal rkpд tahun 2021	29
Lampiran 4. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2021	36
Lampiran 5. Rumusan rencana program dan kegiatan kecamatan Maritengngae tahun 2021 dan prakiraan maju tahun 2022	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Perencanaan pembangunan, dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Pembangunan merupakan proses yang berjalan secara stimulan yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan arah dan tindakan yang diharapkan di masa depan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. Pelaksanaan merupakan aktualisasi dari perencanaan yang telah ditetapkan, sedangkan pengendalian merupakan proses pengarahan kegiatan agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sedangkan evaluasi merupakan aktifitas menilai hasil yang terjadi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan bersama. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Maritengngae mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Maritengngae dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan dirumuskan setiap tahun. Perencanaan Kerja ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi

kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dan mempertimbangkan usulan masyarakat. Perencanaan kerja tahunan menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidak berhasilannya. Adapun cakupan perencanaan kerja tahunan meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Renja Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kecamatan Maritengngae. Sejalan dengan itu, muatan Renja Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam RKA (rencana kerja anggaran) Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang selama satu tahun anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Renja Kecamatan Maritengngae tahun 2022 disusun berdasarkan hasil analisa untuk mendukung pencapaian kinerja aparatur di lingkup Pemerintah Kecamatan Maritengngae dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Maritengngae dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar acuannya.

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6133);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 199);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 927);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1955);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 461);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1538);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 1540);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1541);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1619);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 37. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
 38. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah (RPJPD Propinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2008-2028) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 7);
 39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Daerah;

40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Prov. Sulsel Nomor 301);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Sidenreng Rappang Tahun 2007, Nomor 26);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012, Nomor 26);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 5);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021, Nomor 71);
46. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Maritengngae tahun 2018 – 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang adalah untuk menjabarkan Perubahan Renstra Kecamatan Maritengngae tahun 2018 – 2023 yang merupakan perencanaan satu periode (5 tahun) ke dalam perencanaan yang sifatnya tahunan (1 tahun).

Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

- Menyiapkan Acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Maritengngae;
- Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis Renjra Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN terdiri atas beberapa bagian yaitu latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan
- BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU terdiri atas beberapa bagian yaitu Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN terdiri atas beberapa bagian yaitu Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Maritengngae
- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH terdiri atas beberapa bagian yaitu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, dan Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
- BAB IV. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah

Rencana Kerja merupakan program kerja kegiatan Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya dan menjadi bagian dari Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2021 yang telah dilaksanakan, dapat kita lihat pada uraian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran yang mencakup kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kegiatan penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah, kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan, kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor, kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor, kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, dan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran telah mencapai tingkat realisasi target Renja 100% dan Capaian target Renstra (periode 2018-2023) sampai tahun 2021 diperkirakan telah mencapai 60%.

Walaupun dalam proses pelaksanaan kegiatan hingga penyelesaian pertanggung jawabannya masih kadang menemui kendala berupa lambatnya proses pencairan dana, namun semua bisa diatasi dengan ketekunan penanggung jawab kegiatan dan pengelola keuangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mencakup kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas, kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas, Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Kegiatan Pengadaan Mebeleur, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas, kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas, kegiatan pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah jabatan/dinas , kegiatan pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor, kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur, kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas dan kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor telah

mencapai tingkat realisasi target Renja 100% dan Capaian target Renstra (periode 2018-2023) sampai tahun 2021 diperkirakan telah mencapai 60%.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur mencakup kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu telah mencapai tingkat realisasi target Renja 0% dan Capaian target Renstra (periode 2018-2023) sampai tahun 2020 diperkirakan telah mencapai 20%.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan yang mencakup kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Kinerja SKPD, telah mencapai tingkat realisasi target Renja 0% dan Capaian target Renstra (periode 2018-2023) sampai tahun 2020 diperkirakan telah mencapai 20%.
5. Program Peningkatan Kerja Sama Antar Daerah mencakup kegiatan Musrenbang Perencanaan Pembangunan Daerah telah mencapai tingkat realisasi target Renja 0% dan Capaian target Renstra (periode 2018-2023) sampai tahun 2021 diperkirakan telah mencapai 40%.
6. Program Pembangunan Sarana/Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang mencakup kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan telah mencapai tingkat realisasi target Renja 29% dari target sebesar 20% dan Capaian target Renstra (periode 2018-2023) sampai tahun 2020 diperkirakan telah mencapai 29% dari target sebesar 20%. Realisasi capaian ini melebihi dari target yang ditetapkan disebabkan meningkatnya antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, hal ini menunjukkan bahwa pilihan jenis kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat kelurahan dan pelaksana kegiatan memiliki kemampuan untuk melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang mencakup kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan telah mencapai tingkat realisasi target Renja 36% dari target sebesar 30% dan Capaian target Renstra (periode 2018-2023) sampai tahun 2021 diperkirakan telah mencapai 50% dari target sebesar 55%.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2021 untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel TC 29.

TABEL TC-29. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

OPD : KECAMATAN MARITENGGAE

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2021) TARGET APBD	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	CAT.				
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)								
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12				
Non Program/Belanja Tidak Langsung															
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	Pemberian Gaji dan Tunjangan PNS dan CPNS	70 Bulan	14	14	14	100	14	42	60					
	Tambahan Penghasilan	Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS dan CPNS	65 Bulan	13	13	13	100	13	39	60					
Program/Belanja Langsung															
X	XX	XX	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan adminstrasi layanan perkantoran	100 %	20	20	20	100	20	60	60	
X	XX	XX	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai yang diadakan	1.742 Lembar	290	300	244	81	320	854	49	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2021) TARGET APBD	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	CAT.
									TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12
X	XX	XX	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	12	12	6	50	12	30	50	
X	XX	XX	01	03	Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	12	12	6	50	12	30	50	
X	XX	XX	01	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Waktu penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah	60 bulan	12	12	6	50	12	30	50	
X	XX	XX	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	146 unit	30	30	18	60	32	80	11	
X	XX	XX	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	60 bulan	12	12	12	100	12	36	60	
X	XX	XX	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60 bulan	12	12	12	100	12	36	60	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2021) TARGET APBD	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	CAT.
									TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12
X	XX	XX	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	116 Kali	25	27	25	93	30	80	69	
X	XX	XX	01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	800 Kali	170	180	135	75	200	505	63	
X	XX	XX	01	20	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	60 bulan	12	12	12	100	12	36	60	
X	XX	XX	02		Pogram Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	20	20	20	100	20	60	60	
X	XX	XX	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	
X	XX	XX	02	06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	
X	XX	XX	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	40 unit	9	9	0	0	10	19	48	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2021) TARGET APBD	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	CAT.			
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)							
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12			
X	XX	XX	02	08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah dan Jenis Peralatan rumah dinas diadakan	0 unit	0	0	0	0	0		
X	XX	XX	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	31 unit	7	7	5	71	9	21	68
X	XX	XX	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	30 unit	7	7	1	14	8	16	53
X	XX	XX	02	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah dan jenis rumah dinas yang dipelihara secara berkala	5 unit	1	1	1	100	1	3	60
X	XX	XX	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah dan jenis gedung kantor yang dipelihara secara berkala	40 unit	8	8	8	100	8	24	60
X	XX	XX	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas operaional yang dipeliharahan secara berkala	140 unit	28	28	14	50	30	72	51
X	XX	XX	02	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Yang dipelihara Rutin/Berkala	0 unit	0	0	0	0	0	0	0

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2021) TARGET APBD	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	CAT.					
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)									
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12					
X	XX	XX	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara berkala	36 unit	7	7	0	0	9	16	44		
X	XX	XX	02	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah jabatan/dinas	Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah jabatan/Dinas yang dipelihara rutin/berkala	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	
X	XX	XX	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara secara berkala	50 unit	10	10	9	90	12	31	62		
X	XX	XX	02	29	Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur	Jumlah dan Jenis Peralatan Mebeleur Yang Dipelihara Rutin/Berkala	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	
X	XX	XX	02	41	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah Luasan Rumah Dinas yang direhabilitasi Sedang/Berat	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	
X	XX	XX	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2021) TARGET APBD	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	CAT.
										TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)				
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12
X	XX	XX	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kepatuhan Aparatur	0	%	0	0	0	0	0	0	0	
X	XX	XX	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari Tertentu Yang Diadakan	0	Stel	0	0	0	0	0	0	0	
X	XX	XX	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	%	100	0	0	0	100	100	100	
X	XX	XX	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6	laporan	2	0	0	0	2	6	100	
X	XX	XX	16		Program Peningkatan Kerja Sama Antar Daerah	Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan	100	%	0	20	20	100	20	40	40	
X	XX	XX	16	04	Kegiatan Musrenbang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah	300	Org	0	220	295	134	150	445	148	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2021) TARGET APBD	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	CAT.				
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)								
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12				
1	20	XX	28		Program Pembangunan Sarana/Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan	0	-	0	0	0	0	0		
1	20	XX	28	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	0	Org	0	0	0	0	0	0	
1	20	XX	28	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	0	Org	0	0	0	0	0	0	
1	20	XX	29		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan	100	%	20	20	20	100	20	60	60
1	20	XX	29	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	65	Kali	13	13	13	100	13	39	60
1	20	XX	29	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	35	Kel	7	7	7	100	7	21	60

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2021) TARGET APBD	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	CAT.				
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)								
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12				
1	20	XX	29	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	35 Kel	7	7	7	100	7	21	60	

PENYESUAIAN KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

OPD : KECAMATAN MARITENGGAE

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2021) TARGET APBD	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RESTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2021		CAT.
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11	12
7											
7	01										

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2021) TARGET APBD	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	CAT.
									TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)				
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12	
7	.01	.02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	0		0	0	100	100	100	
7	.01	.02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	0		0	0	100	100	100	
7	.01	.02	2.04	.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	2 Urusan	0	1	1	100,00	1	2	100,00	
7	.01	.02	2.04	.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	2 Urusan	0	1	1	100,00	1	2	100,00	
7	.01	.03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	72 %	0	100	100	100	100%	100%	100	
7	.01	.03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	72 %	0	100	100	100	100	100	100	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2021) TARGET APBD	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	CAT.	
									TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)					
1	2				3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12	
7	.01	.03	2.01	.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	2	Urusan	0	1	1	100,00	1	2	100,00	
7	.01	.03	.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	72	%	0	100	15	15	100	100	49	
7	.01	.03	.2.02	.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	6.256	Orang	0	1974	134	6,79	2.420	2.554	40,82	
7	.01	.03	.2.02	.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	38.723	Orang	0	1084	293	27,03	1.315	1.608	4,15	
7	.01	.03	.2.02	.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	7	Kel	0	7	7	100,00	0	7	100,00	
7	.01	.06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	0	0	0	0	100	100	100	
7	.01	.06	.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	0	0	0	0	100	100	100	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2021) TARGET APBD	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	CAT.		
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12		
7	.01 .06 .2.01 .03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	5 Desa	0	0	0	0	5	5	100,00		
7	.01 .06 .2.01 .07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	5 Desa	0	0	0	0	5	5	100,00		
7	.01 .06 .2.01 .11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	5 Desa	0	0	0	0	5	5	100,00		
X	XX 01	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100	100	100	88,88%	100%	100%	38,07		
X	XX 01	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100%	100	57,14	57,14	100%	100%	51,43		
X	XX 01	2.02 .01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	14	14	8	57,14	14	36	51,43	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2021) TARGET APBD	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	CAT.				
			TARGET	UNIT		TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)								
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12					
X	XX	01	2.06		XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%		100	39,78	39,78	100	100	47,86	
X	XX	01	2.06	.01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	60	Bulan	-	12	0	0,00	40	40	66,67	
X	XX	01	2.06	.02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	145	Unit	28	47	1	2,13	45	74	51,03	
X	XX	01	2.06	.04	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	172	Unit	-	95	35	36,84	80	115	66,86	
X	XX	01	2.06	.05	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan kantor yang disediakan	56.500	Lembar	9.726	11.457	4.595	40,11	11.200	25.521	45,17	
X	XX	01	2.06	.08	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Bulan	12	12	6	50,00	12	30	50,00	
X	XX	01	2.06	.09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1250	Kali	15	55	8	14,55	70	93	7,44	
X	XX	01	2.07		XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%			100	0	0	100	100	28,89	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2021) TARGET APBD	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	CAT.
										TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12	
X	XX	01	2.07	.05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	60	Bulan	12	-	-	-	12	24	40,00	
X	XX	01	2.07	.09	XXX Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu penyediaan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	60	Bulan	-	12	-	-	12	12	20,00	
X	XX	01	2.07	.10	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	30	Unit	-	10	-	-	8	8	26,67	
X	XX	01	2.08		XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100	100	50	50	100	100	50,00	
X	XX	01	2.08	.01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai yang disediakan	60	Bulan	12	12	6	50,00	12	30	50,00	
X	XX	01	2.08	.02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	Bulan	12	12	6	50,00	12	30	50,00	
X	XX	01	2.08	.04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	60	Bulan	12	12	6	50,00	12	30	50,00	
X	XX	01	2.09		XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100	31,42	31,42	100	100	62,19	100%	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2021) TARGET APBD	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	CAT.
									TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12
X	XX	01	2.09	.01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	60 Bulan	12	12	6	50,00	12	30	50,00	
X	XX	01	2.09	.05	XXX Pemeliharaan Mebel	Jumlah dan Jenis Mebel yang disediakan jasa Pemeliharaan	38 Unit	16	14	3	21,43	16	35	92,11	
X	XX	01	2.09	.06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	9 Unit	-	6	1	16,67	5	6	66,67	
X	XX	01	2.09	.09	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	15 Unit	-	3	1	33,33	5	6	40,00	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara kelembagaan, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dan melaksanakan tugas pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah di Kecamatan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Maritengngae diukur berdasarkan pencapaian terhadap target capaian indikator kinerja pada renstra. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Maritengngae tahun 2020 yaitu; 1). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai nilai 75,86 dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 74 dan, 2). Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik mencapai nilai 100% dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 100%, 3) Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan mencapai nilai 100% dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 100%, dan 4) Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi mencapai nilai 100% dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 100%. Untuk jelasnya, dapat dilihat pada Tabel TC 30.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai lebih dari target yang diharapkan disebabkan indicator yang di survey memiliki nilai rata-rata pelayanan di atas nilai harapan.

TABEL TC-30. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

OPD : KECAMATAN MARITENGGAE

NO.	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RESTRA OPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			73	74	77	80	74,62	75,86	79,92	81,25	
2	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik			100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan			100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi			100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan isu-isu strategis dalam memproyeksi kondisi yang diharapkan kedepan dalam kaitannya dengan bidang tugas Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan karena isu tersebut akan memiliki arti fungsional apabila dibahas dalam kaitannya dengan kondisi realitas organisasi.

Isu penting yang berkaitan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kenyataan yang menggambarkan keadaan atau realitas tentang sebuah pokok permasalahan agar memudahkan dalam mengorganisir isu maka dilakukan identifikasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Maritengngae bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Pelayanan prima, kantor kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan

pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

- d) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
- e) Bencana non alam berupa pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020 dan 2021 berpotensi berlanjut hingga tahun 2022 sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan harus tetap mempertimbangkan upaya pencegahan penularan virus tersebut.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja, pendanaan, dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Maritengngae berdasarkan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah se Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Maritengngae.

Tahun anggaran 2022 Kantor Kecamatan Maritengngae merencanakan 4 (empat) program, yaitu :

1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
3. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
4. Program penunjang urusan pemerintahan daerah

Review terhadap rancangan awal RKPD perlu dilakukan untuk mengukur kesesuaian Rancangan Awal RKPD dengan analisis kebutuhan organisasi. Untuk lebih jelasnya mengenai review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel TC 31.

TABEL TC-31. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

OPD : KECAMATAN MARITENGGAE

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR KEWILAYAHAN										
	KECAMATAN				7.751.710.000					7.751.710.000	
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Maritengngae	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	3.780.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Maritengngae	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	3.780.000	
1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Maritengngae	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	3.780.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Maritengngae	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	3.780.000	
1.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kec.Maritengngae	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	1 Urusan	1.904.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kec.Maritengngae	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	1 Urusan	1.904.000	
1.1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec.Maritengngae	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	1 Urusan	1.876.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec.Maritengngae	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	1 Urusan	1.876.000	

NO.	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Maritengngae	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%	2.007.075.800	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Maritengngae	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	52%	192.273.000	
2.1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Maritengngae	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%	1.644.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Maritengngae	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%	1.644.000	
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Maritengngae	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	1 kegiatan	1.644.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Maritengngae	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	1 kegiatan	1.644.000	
2.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Maritengngae	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%	2.005.431.800	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Maritengngae	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%	2.025.069.000	
2.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec.Maritengngae	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	7 kegiatan	791.287.800	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec.Maritengngae	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	7 kegiatan	803.425.000	
2.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec.Maritengngae	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	12 Bulan	1.212.500.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec.Maritengngae	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	12 Bulan	1.220.000.000	
2.2.4	Evaluasi Kelurahan	Kec. Maritengngae	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	7 Kel	1.644.000	Evaluasi Kelurahan	Kec. Maritengngae	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	7 Kel	1.644.000	

NO.	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Kec. Maritengngae	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	4.932.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Kec. Maritengngae	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	4.932.000	
3.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kec. Maritengngae	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	4.932.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kec. Maritengngae	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	4.932.000	
3.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Maritengngae	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	5 Desa	1.644.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Maritengngae	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	5 Desa	1.644.000	
3.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Maritengngae	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	5 Desa	1.644.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Maritengngae	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	5 Desa	1.644.000	
3.1.3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Maritengngae	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	5 Desa	1.644.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Maritengngae	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	5 Desa	1.644.000	
4.	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Maritengngae	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	5.735.922.200	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Maritengngae	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	5.716.285.000	

NO.	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Maritengngae	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.793.188.000	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Maritengngae	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.793.188.000	
4.1.1	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Maritengngae	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	4.793.188.000	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Maritengngae	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	4.793.188.000	
4.2.	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Maritengngae	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	168.521.900	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Maritengngae	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	168.521.900	
4.2.1	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Maritengngae	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	763.200	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Maritengngae	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	763.200	
4.2.2	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Maritengngae	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	47 Unit	81.403.800	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Maritengngae	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	47 Unit	81.403.800	
4.2.3	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Maritengngae	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	95 Unit	2.539.900	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Maritengngae	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	95 Unit	2.539.900	
4.2.4	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Maritengngae	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	11.457 Lembar	21.699.000	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Maritengngae	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	11.457 Lembar	21.699.000	
4.2.5	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Maritengngae	Waktu Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	7.671.000	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Maritengngae	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	12 Bulan	7.671.000	
4.2.6	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Maritengngae	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	55 Kali	54.445.000	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Maritengngae	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	55 Kali	54.445.000	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Maritengngae	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	64.448.700	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Maritengngae	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	64.448.700	
	XXX Pengadaan Mebel	Kec. Maritengngae	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	12 Bulan	-	XXX Pengadaan Mebel	Kec. Maritengngae	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	12 Bulan	-	
	XXX Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Maritengngae	Waktu penyediaan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	12 Bulan	16.887.500	XXX Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Maritengngae	Waktu penyediaan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	12 Bulan	16.887.500	
4.3.1	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Maritengngae	Jumlah dan jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	10 Unit	47.561.200	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Maritengngae	Jumlah dan jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	10 Unit	47.561.200	
4.4	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Maritengngae	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	459.469.800	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Maritengngae	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	459.469.800	
4.4.1	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Maritengngae	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	11.177.000	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Maritengngae	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	11.177.000	
4.4.2	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Maritengngae	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	58.326.000	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Maritengngae	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	58.326.000	
4.4.3	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Maritengngae	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	389.966.800	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Maritengngae	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	389.966.800	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.5	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Maritengngae	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	250.293.800	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Maritengngae	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	230.656.600	
4.5.1	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Maritengngae	Waktu penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas kantor	12 Bulan	50.074.200	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Maritengngae	Waktu penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas kantor	12 Bulan	50.074.200	
4.5.2	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Maritengngae	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	14 Unit	6.163.000	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Maritengngae	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	14 Unit	6.163.000	
4.5.3	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Maritengngae	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	6 Unit	2.181.000	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Maritengngae	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	6 Unit	2.181.000	
4.5.4	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Maritengngae	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	3 Unit	191.875.600	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Maritengngae	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	3 Unit	172.238.400	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Maritengngae pada tahun perencanaan 2022 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

- a. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan;
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- c. Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah;
- d. Menurunnya tingkat kemiskinan;
- e. Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan;
- f. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur daerah yang berkualitas;
- g. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
- h. Meningkatnya pertumbuhan investasi dan daya saing daerah;
- i. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
- j. Meningkatnya kualitas pelayanan public;
- k. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
- l. Terwujudnya desa maju dan mandiri;
- m. Meningkatnya kenyamanan kehidupan bermasyarakat.

Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi misi Kabupaten Sidenreng Rappang maka semua hal tersebut di atas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Dan sehubungan bahwa Kecamatan Maritengngae bukanlah Perangkat Daerah pengemban delegasi yang menangani teknis pelaksana usulan masyarakat maka dalam Renja Kecamatan Maritengngae ini tidak terdapat usulan masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat dapat dilihat pada Tabel TC 32.

**TABEL TC-32. USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DARI
PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional Lima Tahun (jangka menengah) merupakan bentuk kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, kemudian dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaksanaannya dilakukan dua tahapan yaitu, APBD awal dan APBD perubahan. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus selalu mengacu pada Program dan Kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Visi RPJM tahun 2020 – 2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong” dengan Misi:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
9. Sinergitas Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Pembangunan daerah pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD). Pembangunan Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan tingkat provinsi dan tingkat nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Maritengngae

a. Tujuan

Untuk mencapai misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang maka Kantor Kecamatan Maritengngae menetapkan tujuan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan

b. Sasaran

Dalam rangka untuk mencapai tujuan seperti tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran strategis yang akan ditempuh yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum
 2. Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi
 3. Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan
- c. Indikator Sasaran Rencana Kerja
- Adapun indikator sasaran dan target kinerja tahun 2022 dari Rencana Kerja Kecamatan Maritengngae yaitu:
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target kinerja yaitu nilai 81,25.
 2. Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik dengan target kinerja nilai 100%.
 3. Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan dengan baik dengan target kinerja nilai 100%.
 4. Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi dengan baik dengan target kinerja nilai 100%.

Selanjutnya tujuan dan sasaran Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang beserta indikator kerjanya disajikan pada table 1 berikut ini:

Tabel 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang

Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Indikator	Target Kinerja 2022
Unsur Kewilayahan			
Tujuan; Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	81,25
Sasaran 1; Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	$\frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum}} \times 100 \%$	100%
Sasaran 2; Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang dikooordinasikan}}{\text{Jumlah kegiatan}} \times 100 \%$	100%
Sasaran 3; Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	$\frac{\text{Jumlah Desa yang dibina dan diawasi}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100 \%$	100%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Kecamatan Maritengngae dimana pada tahun 2022 menargetkan peningkatan kualitas layanan dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai 81,25 persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik dengan nilai 100%, persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan dengan baik dengan nilai 100%, dan persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi dengan baik dengan nilai 100%.

Perencanaan program tahun 2022 terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

- a. Program pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- b. Program penunjang pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Darah Kabupaten/Kota

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub kegiatan Kantor Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel TC 33 sedangkan uraian per unit organisasi dapat dilihat pada Lampiran 1.

TABEL TC-33. RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

OPD : KECAMATAN MARITENGGAE

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023				
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
7	Unsur Kewilayahan											
7	01	Kecamatan			7.751.710.000				8.081.355.000			
7	.01	.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Maritenggae	100%	3.780.000	DAU	100%	8.985.000		
7	.01	.02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Maritenggae	100%	3.780.000	DAU	100%	8.985.000	
7	.01	.02	2.04	.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	Kec.Maritenggae	1 Urusan	1.904.000	DAU	1 Urusan	5.963.000
7	.01	.02	2.04	.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	Kec.Maritenggae	1 Urusan	1.876.000	DAU	1 urusan	3.022.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Maritengngae	100%	2.026.713.000	DAU		100%	1.300.531.500
7.01.03.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Maritengngae	100%	1.644.000	DAU		100%	1.672.000
7.01.03.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kec. Maritengngae	1 kegiatan	1.644.000	DAU		1 Kegiatan	1.672.000
7.01.03.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Maritengngae	100%	2.025.069.000	DAU		55%	1.298.859.500
7.01.03.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kec. Maritengngae	7 kegiatan	803.425.000	DAU		7 kegiatan	466.637.500
7.01.03.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kec. Maritengngae	12 Bulan	1.220.000.000	DAU		12 Bulan	830.550.000
7.01.03.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	Kec. Maritengngae	7 Kel	1.644.000	DAU		7 Kel	1.672.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023					
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		Keuangan Perangkat Daerah											
X	XX	01	2.02	.01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Maritengngae	14 Bulan	2.185.453.150	DAU		14 Bulan	2.200.000.000
X	XX	01	2.06		XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Maritengngae	100%	168.521.900	DAU		100%	174.445.000
X	XX	01	2.06	.01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Maritengngae	12 Bulan	763.200	DAU		12 Bulan	756.000
X	XX	01	2.06	.02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec. Maritengngae	47 Unit	81.403.800	DAU		0 Unit	83.160.000
X	XX	01	2.06	.04	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	Kec. Maritengngae	95 Unit	2.539.900	DAU		84 Unit	2.157.000
X	XX	01	2.06	.05	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	Kec. Maritengngae	11.457 Lembar	21.699.000	DAU		11.200 Lembar	7.655.000
X	XX	01	2.06	.08	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Maritengngae	12 Bulan	7.671.000	DAU		12 Bulan	18.619.000
X	XX	01	2.06	.09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Maritengngae	55 Kali	54.445.000	DAU		65 Kali	62.098.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023					
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
X	XX	01	2.07		XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Maritengngae	100%	64.448.700	DAU		100%	241.675.600
X	XX	01	2.07	.05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	Kec. Maritengngae	12 Bulan	-	DAU		12 Bulan	-
X	XX	01	2.07	.09	XXX Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu penyediaan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec. Maritengngae	12 Bulan	16.887.500	DAU		12 Bulan	67.343.500
X	XX	01	2.07	.10	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Kec. Maritengngae	10 Unit	47.561.200	DAU		12 Unit	174.332.100
X	XX	01	2.08		XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Maritengngae	100%	459.469.800	DAU		100%	570.529.200
X	XX	01	2.08	.01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Maritengngae	12 Bulan	11.177.000	DAU		12 Bulan	11.660.000
X	XX	01	2.08	.02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Maritengngae	12 Bulan	58.326.000	DAU		12 Bulan	66.746.000
X	XX	01	2.08	.04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Maritengngae	12 Bulan	389.966.800	DAU		12 Bulan	492.123.200
X	XX	01	2.09		XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Maritengngae	100%	230.656.600	DAU		100%	747.061.700

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023					
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
X	XX	01	2.09	.01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas kantor	Kec. Maritengngae	12 Bulan	50.074.200	DAU		12 Bulan	52.830.600
X	XX	01	2.09	.06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	Kec. Maritengngae	14 Unit	6.163.000	DAU		6 unit	2.900.000
X	XX	01	2.09	.09	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Kec. Maritengngae	6 Unit	2.181.000	DAU		5 unit	509.231.100
X	XX	01	2.09		XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Kec. Maritengngae	3 Unit	172.238.400	DAU		7 unit	182.100.000
J U M L A H									7.751.710.000				8.081.355.000

4.2. Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Maritengngae Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. Indikator Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
1.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan
1.1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan
2.1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa
2.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan
2.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
2.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
2.2.4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi
3.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi
3.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
3.1.3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi
4.	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran
4.1	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.1.1	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.2.	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.2.1	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
4.2.2	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
4.2.3	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan
4.2.4	XXX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan
4.2.5	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu
4.2.6	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
4.3	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.3.1	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan
4.3.2	XXX Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu penyediaan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
4.3.3	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang diadakan
4.4	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.4.1	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat
4.4.2	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.4.3	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran
4.5	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.5.1	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas kantor
4.5.2	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
4.5.3	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara
4.5.4	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara

Selanjutnya pengukuran Indikator Sasaran/ Kinerja Program (Outcome) Kecamatan Maritengngae disajikan pada table 3 berikut ini:

Tabel 3. Formulasi pengukuran Indikator Sasaran/ Kinerja Program (Outcome) Kecamatan Maritengngae

No.	Program	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Target Kinerja 2022
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	$\frac{\text{Jumlah Urusan Pelayanan Publik yang diselenggarakan}}{\text{Jumlah Urusan Pelayanan Publik}} \times 100 \%$	100%
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan}}{\text{Jumlah Masyarakat Desa dan Kelurahan Produktif}} \times 100 \%$	52%
3.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	$\frac{\text{Jumlah Desa yang dibina dan diawasi}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100 \%$	100%
4.	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	$\frac{\text{Jumlah Layanan Administrasi yang diselenggarakan}}{\text{Jumlah Layanan Administrasi}} \times 100 \%$	100%

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2022, dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maritengngae Tahun 2022 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Maritengngae dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Maritengngae sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maritengngae merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Maritengngae;
3. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maritengngae merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Kecamatan Maritengngae;
4. Kecamatan Maritengngae berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Kerja dengan Rencana Strategis Kecamatan Maritengngae Tahun 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Semoga dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maritengngae ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.